



PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENERBITAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN DI BURSA EFEK INDONESIA

Reza Safira Nabilla^a, Useldi^b, Ahmad Syukron Prasaja^c

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi, rezasafiranabilla11@gmail.com,
Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi, aja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi

^cFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi, gwi.awalhabibah@uinjambi.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRACT

This thesis aims to find out "Factors Affecting the Performance of Village Financial Management (Study in Betung Bedarah Barat Village, Tebo Ilir District, Tebo Regency)". This study was conducted to determine the factors that affect the Performance of Village Financial Management. The data collection of this research used a questionnaire survey. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing are Village Apparatus Capacity has no effect on Village Financial Management Performance, while Financial Reporting Compliance has a positive and significant influence on Village Financial Management Performance, and Quality of BPD Supervision also has no effect on Village Financial Management Performance.

Keywords: Village financial management performance, Village apparatus capacity, Financial reporting compliance, BPD supervision quality.

ABSTRAK

Tulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)". Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survey kuesioner. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis adalah Kapasitas Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Ketaatan Pelaporan Keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, dan Kualitas Pengawasan BPD juga tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kualitas Pengawasan BPD.

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang merupakan jantung dari pembangunan pemerintahan. Disahkannya Undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 bertujuan untuk menyadarkan dan memberikan kejelasan kepada desa tentang status dan tempatnya dalam sistem Ketatanegaraan Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, negara memberdayakan desa untuk mengatur struktur dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya sendiri dengan mengedepankan pengelolaan desa yang terbuka, akuntabel, profesional, efisien dan efektif untuk menggali potensi desa. .[1]

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Kebijakan otonomi daerah tersebut tentunya juga berimplikasi terhadap sistem administrasi pemerintahan desa (Solekhan, 2014:9). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berhasil menggabungkan fungsi *self governing community dengan local self government*, sehingga desa memenuhi syarat entitas pelaporan, (Hoesada, 2016:3337). Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang desa tersebut, maka pemerintah pusat memberikan aliran dana tambahan kepada desa diluar alokasi dana desa yang sudah diterima desa setiap tahunnya, yaitu dana Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Dengan adanya dana desa yang diterima desa dari pemerintahan pusat mulai tahun 2015, maka penerimaan desa mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga desa dituntut untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangannya. [2]

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) adalah, pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. [3]

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesi, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdaakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai lapisan terbawah dari struktur pemerintah, aktivitas masyarakat di desa sudah semestinya mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. [4]

Pemerintahan desa bagian dari entitas pelaporan keuangan yang memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan perundangan. Kendala dan permasalahan dalam penyajian laporan keuangan dana desa antara lain, masih rendahnya pemahaman tentang penyajian laporan keuangan desa yang memuat informasi lengkap dan relevan serta ketersediaan secara langsung. Ketersediaan sistem informasi yang memadai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Menurut semakin baik dan berkualitasnya regulasi, komitmen organisasi, komunikasi dan sumber daya manusia yang ada, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dengan meningkatkan pengelolaan keuangan desa maka kinerja pemerintahan desa juga semakin optimal. [5]

1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori ini memandang Steward (pemerintah desa) memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Steward dalam penelitian ini bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola keuangan desa, dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan fungsi dengan tempat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan *principal*. Pada prinsipnya steward akan melaksanakan tugas dengan baik dalam hal pengalokasian pengelolaan keuangan karena steward akan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Peran steward dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada *principal* guna terselenggaranya tujuan ekonomis, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka steward melakukan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. [6]

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berlangsung selama 1 tahun anggaran yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Tugas dan wewenang kepala desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan antara lain menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa dan menetapkan Bendahara Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Sekretaris Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala saksi sebagai komponen pelaksana teknis sesuai bidangnya dan seorang Bendahara Desa yang merupakan unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan (Kepala Urusan Keuangan) untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan desa. [7]

2.3 Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu segala hak dan kewajiban desa. Hak dan tanggung jawab tersebut menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang harus diatur dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengembangan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pemantauan, dan pengelolaan kekayaan milik desa. Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. [8]

2.4 Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas Aparatur Desa merupakan kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya untuk perubahan, indikator dalam penelitian ini yaitu, tingkat pemahaman, keterampilan, kompetensi.

Kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Selanjutnya, menurut Soeprapto (2010), kapasitas adalah pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi dan kondisi-kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap system, jaringan kerja, organisasi, dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu. Suryukoco (2010) mengungkapkan kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional. [9]

2.5 Ketaatan Pelaporan Keuangan

Ketaatan merupakan kesediaan untuk mematuhi hukum dan perintah atau untuk menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai kebenaran. Ketaatan Pelaporan Keuangan adalah ketaatan aparatur desa dalam pelaksanaan pelaporan keuangan sesuai dengan Permandagri No. 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dengan indikator sebagai berikut, transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib.[10]

2.6 Kualitas Pengawasan BPD

Kualitas merupakan tingkatan yang menggambarkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu, kualitas diartikan sebagai komponen-komponen yang ada dalam suatu barang atau hasil dan barang tersebut digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengawasan kualitas adalah kegiatan memelihara dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan. Pengawasan di sisi lain, adalah proses dimana manajemen mencari informasi tentang apa yang dilakukan bawahan dan bagaimana arahan, rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang disepakati. Kualitas adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memperoleh informasi apa yang telah dilakukan bawahan sehubungan dengan kesesuaian perintah, rencana, tujuan, dan kebijakan.[11]

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang dipakai merupakan data primer. Yang menjadi objek penelitian yaitu perangkat desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Adapun alat analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linier Berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penggunaan statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD, terhadap kapasitas aparatur desa. Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan bantuan SPSS diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kapasitas_Aparatur_Des a	31	15	35	859	27.71	4.076
Ketaatan_pelaporan_keu angan	31	15	30	779	25.13	3.649
kualitas_pengawasan_bp d	31	21	35	906	29.23	3.964
kinerja_pengelolaan_keu angan	31	6	19	491	15.84	2.956
Valid N (listwise)	31					

Sumber data primer

Berikut ini adalah pertanyaan nilai minimum, maksimum, sum, mean, std. deviation seluruh variabel sesuai dengan tabel. 3.1

1. Variabel Kapasitas aparatur desa menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 31 responden dengan nilai minimum 15, nilai maksimum 35, nilai sum 856, mean dengan nilai 27.71, nilai standar deviation adalah 4.076 menjauhi angka 0 dengan begitu dapat dikatakan bahwa penyebaran data cukup beragam.

2. Variabel Ketaatan pelaporan keuangan menunjukkan jumlah responden(N) sebanyak 31 responden dengan nilai minimum 15, maksimum dengan nilai 30, sum dengan nilai 779, mean dengan nilai 5.13, dan nilai standar deviasi 3.649, menjauhi angka 0 dengan begitu dapat dikatakan bahwa penyebaran data dapat beragam.
3. Variabel kualitas pengasas BPD menunjukkan jumlah responden(N) sebanyak 31 responden dengan nilai minimum 21, maksimum dengan nilai 35, sum dengan nilai 906, mean dengan nilai 29.23, dan nilai standar deviasi 3.964, menjauhi angka 0 dengan begitu dapat dikatakan bahwa penyebaran data dapat beragam.

4.2 Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukannya pengujian data baik untuk deskripsi data penelitian maupun untuk pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data karena jenis data penelitian adalah primer.

4.3 Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kebenaran suatu instrument atau pernyataan yang ada di kuesioner. Dasar analisis yang dipakai untuk pengujian hipotesis.

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Variabel Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas Aparatur Desa (XI)	r hitung	r tabel	Keterangan
XI.1	0,802	0,355	Valid
XI.2	0,740	0,355	Valid
XI.3	0,639	0,355	Valid
XI.4	0,834	0,355	Valid
XI.5	0,849	0,355	Valid
XI.6	0,792	0,355	Valid
XI.7	0,761	0,355	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.9 Diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Kapasitas Aparatur Desa memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Oleh karena itu, seluruh pertanyaan kuesioner variabel Kapasitas Aparatur Desa dinyatakan valid.

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan

Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2)	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,743	0,355	Valid
X2.2	0,796	0,355	Valid
X2.3	0,760	0,355	Valid
X2.4	0,765	0,355	Valid
X2.5	0,909	0,355	Valid

X2.6	0,570	0,355	Valid
------	-------	-------	-------

Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.4 Diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Oleh karena itu, seluruh pertanyaan kuesioner variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan dinyatakan valid.

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pengawasan (BPD)

Kapasitas Aparatur Desa (X3)	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0,770	0,355	Valid
X3.2	0,662	0,355	Valid
X3.3	0,803	0,355	Valid
X3.4	0,717	0,355	Valid
X3.5	0,762	0,355	Valid
X3.6	0,742	0,355	Valid
X3.7	0,709	0,355	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.5 Diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Kualitas Pengawasan BPD memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Oleh karena itu, seluruh pertanyaan kuesioner variabel Kualitas Pengawasan BPD dinyatakan valid.

Tabel 3.5

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Kapasitas Aparatur Desa (Y)	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,873	0,355	Valid
Y.2	0,907	0,355	Valid
Y.3	0,786	0,355	Valid
Y.4	0,889	0,355	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4. Diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Oleh karena itu, seluruh pertanyaan kuesioner variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan valid.

3.6 Uji Reabilitas

Uji reabilitas pada penelitian ini memiliki Cronbach Alpha Coefisient dikatakan reabilitas jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian reabilitas setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,901	Reliabel
X2	0,852	Reliabel
X3	0,874	Reliabel

Y	0,886	Reliabel
---	-------	----------

Sumber: Data Primer diolah 2022

Dari tabel 3.6. Menunjukkan bahwa, hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel diatas dinyatakan reliable dengan hasil perhitungan memiliki koefisien keandalan (reliabilitas) diatas $>0,70$ atau lebih besar dari nilai r tabel yang dihasilkan.

Tabel 3.7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.37756311
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.072
	Negative	-.135
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan tabel 3.7. Diatas, diperoleh nilai kolomogorov Smirnov sebesar $0,075 > 0,05$. Maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal dan layak dilanjutkan untuk dilakukan pengujian kualitas data selanjutnya

Tabel 3.8
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kapasitas Aparatur Desa	.280	3.570
Ketaatan Pelaporan keungan Desa	.235	4.252
Kualitas Pengawasan BPD	.280	3.572

Dapat dilihat dari tabel diatas hasil perhitungan yang ada pada tabel uji multikolinieritas, masing-masing nilai VIF tidak lebih besar atau kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.

3.9 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diukur dengan menggunakan uji glejser. Jika nilai sig $> \alpha (0,05)$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai sig $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.379	2.025		-1.669	.107
Kapasitas_Aparatur_Des	.176	.123	.243	1.432	.164

Ketaatan_pelaporan_keuangan	.424	.150	.523	2.830	.009
kualitas_pengawasan_bpd	.126	.126	.169	.998	.327

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Kapasitas Aparatur Desa (X1) sebesar 0,164 > 0,05. Ketaatan Laporan Keuangan (X2) sebesar 0,009 > 0,05, Kualitas Pengawasan BPD (X3) sebesar 0,327 > 0,05, maka variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.10 Uji-F (Simultan)

Uji kelayakan model yang dihasilkan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. kriteria pengujianya sebagai berikut: a) Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan dapat digunakan analisis berikutnya, b) Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan analisis selanjutnya.

Tabel 3.10
Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	205.263	3	68.421	32.450	.000 ^b
	Residual	56.930	27	2.109		
	Total	262.194	30			

a. Dependent Variable: kinerja_pengelolaan_keuangan

: (Constant), kualitas_pengawasan_bpd, Kapasitas_Aparatur_Desa, Ketaatan_pelaporan_keuangan
Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4. Diatas diperoleh hasil uji F (Anova) nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kapasitas Aparatur Desa (X1) Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2) dan Kualitas Pengawasan BPD (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

3.11 Uji Persial (uji t)

Pengujian hipotesis (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara konstan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (a) jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara persial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (b) jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara persial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.

Tabel 3.11
Uji Persial (Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.379	2.025		-1.669	.107
	Kapasitas_Aparatur_Des	.176	.123	.243	1.432	.164

Ketaatan_pelaporan_keuangan	.424	.150	.523	2.830	.009
kualitas_pengawasan_bpd	.126	.126	.169	.998	.327

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4. Diatas, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- Nilai (sig) untuk variabel Kapasitas Aparatur Desa (X1) sebesar 0,164 yang berarti lebih besar dari nilai α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kapasitas Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan desa betung bedarah barat, kecamatan tebo ilir, kabupaten tebo.
- Nilai (sig) dari variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2) sebesar 0,009 yang berarti lebih besar dari nilai α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
- Nilai (sig) dari variabel Kualitas Pengawasan BPD (X3) sebesar 0,327 yang berarti lebih besar dari nilai α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pelaporan Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan BPD Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

3.12 Uji koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap Y.

Tabel 3.12
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.759	1.452

3.13 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Tabel 3.13
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.379	2.025		-1.669	.107
	Kapasitas_Aparatur_Des	.176	.123	.243	1.432	.164
	Ketaatan_pelaporan_keuangan	.424	.150	.523	2.830	.009
	kualitas_pengawasan_bpd	.126	.126	.169	.998	.327

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4. Di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi linier seperti berikut ini :

$$Y=1.199+0,21X1+0,425X2+0,513X3+e$$

Persamaan diatas memiliki makna yaitu:

- a. Nilai konstanta= 3.379

Memiliki arti apabila variabel Kapasitas Aparatur Desa (X1), Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2), Kualitas Pengawasan BPD (X3) dalam kualitas laporan keuangan = 0, maka Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 3,379.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kapasitas Aparatur Desa (X1), tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
- b. Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2), berpengaruh Terhadap Pelaporan Keuangan Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
- c. Kualitas Pengawasan BPD (X3), tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pengawasan BPD Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
- d. Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, pada Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang mungkin dapat diberikan penelitian untuk beberapa pihak yang mungkin saja dapat digunakan sebaik-baiknya, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Desa
Untuk Pemerintah Desa agar dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD. Agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan jelas.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa, dapat menggunakan uji lain dan menambahkan variabel-variabel yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa serta memperluas sampel dan objek penelitian sehingga hasil selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih untuk peneliti pihaklainnya.

UcapanTerimaKasih

Ucapan Terima Kasih kepada saudara Dr.Usdeldi, S.E., M.Si.,Ak., CA., Asean CPA dan saudara Ahmad Syukro Prasaja, S. Si., M.Sc yang membantu penelitian ini menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA.

- [1] *Akuntansi Desa panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- [2] Dyah Nirmala Arum Janie. *Statistik Deskriptif Dan Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. Semarang University Press, 2012.
- [3] Mahmudi. "manajemen kinerja sektor publik," hlm 84-86. yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- [4] *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung 2016, t.t.
- [5] AAde Nur Rabbiah Nasution. "Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa." *jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit* 8, no. No. 01 (2021): Hlm. 2.
- [6] "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pda Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)." *jurnal ekonomica sharia* Vol. 5, no. No. 2 (Februari 2020): Hlm. 6-7.
- [7] "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten

- Banyuasin)." *jurnal ekonomica sharia* Vol. 5, no. No. 2 (Februari 2020): Hlm. 6.
- [8] Deden Suhendar. "implementasi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa rancasenggang, kecamatan sindangkerta, kabupaten bandung barat (sosialisasi, hambatan, dan dampaknya)." *jurnal academia praja* Vol. 2, no. No. 1 (Februari 2019): Hlm. 2.
- [9] "Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh)." *jurnal akuntansi dan investasi* Vol. 18, no. No. 18 (Juli 2017): Hlm. 9.
- [10] Eko Rahatjo. "Teori Agrisi dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi." *jurnal fokus ekonomi* Vol. 2, no. No. 1 (Juni 2007): Hlm, 3-4.
- [11] Finta Muhti, dan Heru Fahlevi. "Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Stusi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh)." *No. 2* Vol. 18, no. jurnal akuntansi dan investasi (Juli 2017): Hlm. 3.